

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Gery. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan beberapa Variabel Moderating (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Demak)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Darwis, Herman. 2010. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Kinerja Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Partisipasi Masyarakat dan Budaya Politik sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Scientific Management*, Vol. 1, No. 1 April 2010, hal. 1-12.
- Eisenhardt, M.K. 1989. An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 1, hal 57-74.
- Ghozali. Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali. Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hagen, J. 2002. Fiscal Rules, Fiscal Institutions, and Fiscal Performance. *The Economic and Social Review*. Vol. 33, No. 3, hal 263-284.
- Manginte dkk. 2015. Pengetahuan Anggaran Serta Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Budaya Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Anggota DPRD (Studi Kasus di Jayapura). *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Universitas Sumatra Utara Medan*.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Palupi, Nimas. 2012. Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat sebagai Moderasi. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 1, No.2, Tahun 2012.
- Pangesti, Agustina. 2013. Analisis Pengetahuan Dewan tentang Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Menggunakan Variabel Moderating . *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No.1. Tahun 2013.
- Panturanews. 2014. Korupsi yang dilakukan anggota dewan. Melalui <http://www.panturanews.com>

- Patiar dkk. 2014. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, Vol.02, No.01 Februari 2014.
- Sabeni, Arifin. 2005. *Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Keagamaan)*. Disampaikan pada Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro dalam rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar.
- Sudiarta dkk. 2014. Analisis Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderating (Studi Empiris pada Anggota DPRD di Kab.Landak dan Kab.Sanggau Propinsi Kalimantan Barat 2013). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2014.
- Sugiyono. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung:CV. Alfabeta.
- Tap MPR Nomor/XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-undang No.33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No.18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.